

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam bab II diatas dapat disimpulkan kendala yang dihadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY dalam koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mengenai tindak pidana cagar budaya adalah Minimnya jumlah personil yang dimiliki, terbatasnya kualitas penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari segi sumber daya manusianya dalam penanganan tindak pidana perusakan bangunan cagar budaya dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta kendala yang berasal dari segi operasional dan dari segi pembinaan.

B. SARAN

1. Untuk Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kurang berkala dan berkesinambungnya koordinasi dan pengawasan antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), utamanya dalam bidang pembinaan, dimana pelaksanaannya dilakukan sesuai kebutuhan, di satu sisi memang dapat dilihat sebagai kebaikan. Tetapi perlu juga diperhatikan, bahwa akan lebih optimal

apabila terdapat keteraturan pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan.

2. Untuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedepan hendaknya upaya preventif yang dilakukan jajaran satuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih ditingkatkan. Utamanya dalam mensosialisasikan pentingnya melindungi dan melestarikan bangunan cagar budaya dan adanya peraturan – peraturan cagar budaya yang mengandung sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Hal ini dimaksudkan selain untuk menurunkan tingkat kerusakan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan mencerdaskan masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya di Indonesia. Dimana pada gilirannya masyarakat juga memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap eksistensi bangunan cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 1983, *Penegakan Hukum*, BPHN dan Bina Cipta, Jakarta.
- Dinas pariwisata dan kebudayaan kota yogyakarta, 2009, *Panduan Pelestarian Bangunan Warisan Budaya, dinas pariwisata dan kebudayaan, yogyakarta*.
- Barda Nawawi Arief., 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herimanto dan Winarno., 2010, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Zainuddin Ali., 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- H. Oka Yoeti, 2006, *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedurnya*, Percetakan Offset Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, PT Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi*, Dosen dan Mahasiswa, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Purnomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Ghalia, Jakarta Timur.
- Soejono, *Ilmu Kejiwaan Kejahatan*, PT Kaya Nusantara, Bandung.
- P.A.F. Lumintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta.

Kamus :

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

JS Badudu, Sutan Muhamad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Peraturan Perundangan – Undangan :

Undang – Undang Dasar 1945 Amendemen ke-4

Undang – Undang No 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan dan Benda Cagar Budaya.

Internet :

<http://polisijaya.blogspot.com/p/ppns.html>.

<http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>